



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Inovasi Kebijakan Transportasi Multimoda Angkutan Barang dalam Perspektif Ekonomi Biaya Transaksi di Pelabuhan Makassar dan Hinterland

Prakosa Hadi Takaryianto, Prof Wihaha Klrana Jaya, MSoc SC, PHd, Prof Ir Siti Malkhamah, MSc, PHd, Prof. Dr. Ir.

Universitas Gadjah Mada, 2024 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Abstract

This research explored the connectivity of ports with hinterland areas in Indonesia, focusing on the Port of Makassar. Currently, no port in Indonesia has adequate connectivity with its hinterland areas.

This study formulated several research questions: (1) What are the determining factors affecting the formation of hinterland port connectivity? (2) How can it be ensured that the transfer of freight from the port to the warehouse is well-executed to make transaction costs more efficient according to the theory of Transaction Cost Economics (TCE)? (3) How can innovative policies for intermodal freight integration be determined to enhance competitiveness?

The research employed both quantitative and qualitative methods to examine the role of intermodal policy on the connectivity between the hinterland and the Port of Makassar. A case study approach was used for an intensive examination of this issue. The study involved transportation business actors with 150 respondents and 114 truck drivers.

The findings indicated that the primary factors influencing the shift from single-mode to multimodal transportation were port infrastructure readiness, digital technology, freight load, and service integration. The study also identified inefficiencies in transaction costs within multimodal transport at the Port of Makassar, such as informal costs and disruptions in the bulk cargo on unloading process.

The research suggested two innovative policies: the establishment of a Multimodal Transportation Organization and the designation of a Port Special Economic Zone. The organization aims to improve coordination between regulators, operators, and business actors, leveraging digital technology for more efficient multimodal services.

Keywords: multimodal, freight, port, transaction cost, innovation policy



Abstrak

Disertasi ini mengeksplorasi konektivitas pelabuhan dengan daerah hinterland di Indonesia, dengan fokus pada Pelabuhan Makassar. Saat ini, belum ada pelabuhan di Indonesia yang memiliki konektivitas yang mumpuni dengan daerah hinterland-nya. Kebijakan pemerintah saat ini lebih fokus pada penanganan infrastruktur dan sistem teknologi terintegrasi, sementara kebijakan pengintegrasian moda lain ke pelabuhan belum begitu mendapat perhatian yang cukup.

Penelitian ini dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian: (1) Apa saja faktor determinan yang mempengaruhi terbentuknya konektivitas wilayah hinterland pelabuhan melalui pemanfaatan antarmoda barang? (2) Bagaimana cara memastikan bahwa pelayanan perpindahan moda angkutan barang dari pelabuhan ke gudang dapat terlaksana dengan baik sehingga biaya transaksi menjadi lebih efisien sesuai dengan teori Transaction Cost Economics (TCE)? (3) Bagaimana menentukan kebijakan inovatif yang tepat dalam pemanfaatan antarmoda angkutan barang untuk meningkatkan daya saing?

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dalam mengkaji peranan kebijakan pemanfaatan multimoda terhadap konektivitas antara hinterland dengan Pelabuhan Makassar. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menelaah secara intensif permasalahan ini. Penelitian dilakukan pada pelaku usaha transportasi dengan responden sebanyak 150 dan pengemudi truk 114 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi perpindahan moda tunggal menjadi multimoda adalah kesiapan infrastruktur pelabuhan, teknologi digital, muatan barang, dan pemanfaatan pelayanan. Penelitian ini juga menemukan adanya ketidakefisienan biaya transaksi dalam transportasi multimoda di Pelabuhan Makassar, seperti biaya informal dan ketidaklancaran arus bongkar muat barang curah.

Disertasi ini menyarankan dua kebijakan inovatif: pembentukan Organisasi Transportasi Multimoda dan penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Pelabuhan. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara regulator, operator, dan pelaku usaha, serta memanfaatkan teknologi digital untuk pelayanan multimoda yang lebih efisien. Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Pelabuhan diharapkan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan arus kunjungan kapal.

Kata kunci: multimoda, angkutan barang, Pelabuhan, biaya transaksi, inovasi kebijakan